

**REKAPITULASI HASIL TEMUAN BPK-RI ATAS LKPD DAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PADA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2005 S.D. 2021 (KEUANGAN)
YANG BELUM DITINDAKLANJUTI DAN BELUM SESUAI REKOMENDASI PER TANGGAL 16 JUNI 2022**

No.	Jenis Pemeriksaan	Temuan	SKPD	Status Tindak Lanjut	Rekomendasi	Penyebab / Alasan Belum Sesuai	Keterangan
1.	LKPD Tahun 2006	Realisasi Biaya Operasional atas Penerimaan Retribusi lainnya Eks PNPB sebesar Rp.1.647.684.913,38 Tidak Sesuai Ketentuan	Disnakertrans dan Dispenda/Bapenda	BS	Gubernur Kaltim agar memerintahkan kepada masing-masing instansi pemungut dan Dispenda Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyetor kembali ke Kas Daerah atas Biaya Operasional penerimaan retribusi lainnya eks PNPB yang sudah diterima sebesar Rp1.647.684.913,38	Sampai dengan tahun 2021 semester 1 telah ada setoran sebesar Rp1.125.069.902,50 dan semester 2 2021 terdapat tambahan setoran sebesar Rp40.145.000,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp482.465.097,50 yang belum disetor	<ul style="list-style-type: none"> Sisa setoran dari Disnakertras sebesar Rp.482.465.097,50 Sudah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah dan lunas untuk Bapenda sebesar Rp.33.795.747,34
2.	LKPD Tahun 2009	Penatausahaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kalimantan Timur TA 2009 Tidak Memadai dan Terdapat Penyalahgunaan Keuangan Pada UPTD Dispenda Malinau sebesar Rp1.376.760.900,00	Dispenda/Bapenda	BS Rp.1.065.265.789,00	BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Timur agar Menginstruksikan kepada Majelis TP TGR untuk memproses tuntutan ganti rugi atas penyalahgunaan penerimaan pajak daerah pada UPT Dispenda Malinau	Masih terdapat sisa setoran sebesar Rp.1.065.265.789,00	Belum ada pembayaran sampai dengan saat berakhirnya monev tindak lanjut, yang bersangkutan sudah diberikan hukum pidana dan mengajukan surat permohonan penghapusan, selanjutnya menunggu keputusan Majelis TP TGR
3.	LKPD Tahun 2012	Pengelolaan Tagihan Penjualan Angsuran Belum Memadai dan Terdapat Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Belum Dilunasi Sebesar Rp678.387.937,00	Dispenda/Bapenda	BS Rp.678.387.937,00	Gubernur agar Kepala Biro Perlengkapan dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan koordinasi dan menagih kepada para pembeli rumah, tanah, dan kendaraan yang bersangkutan supaya segera melunasi sesuai perjanjian	Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum Terdapat pelunasan atas Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Sebesar Rp678.387.937,00	Belum ada pembayaran sampai dengan saat berakhirnya monev tindak lanjut
4.	LHP Belanja Daerah Tahun 2012 dan 2013	Pemberian Insentif Biaya Pemungutan PBB Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan TA 2012 dan 2013 Kepada Pejabat Instansi Vertikal Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp1.021.338.658,63	Dispenda/Bapenda	BS Rp.848.716.671,57	BPK merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur agar Memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk menarik kembali upah pungut yang berasal dari biaya pemungutan PBB sebesar Rp1.021.338.658,63 dan menyetorkan ke Kas Daerah	Sudah disetor sebesar Rp.172.621.987,06 Masih terdapat sisa setoran sebesar Rp.848.716.671,57	Sudah dilakukan penagihan ke penerima upah pungut PBB melalui surat tagihan yang disampaikan oleh DJP Kaltimara, dan sudah dilakukan penagihan langsung untuk wilayah Jakarta, Salatiga dan Surakarta, hasilnya ada pernyataan bersedia menyicil, membayar, namun ada juga yang tidak mau membayar dan bersedia membuat surat pernyataan. Untuk selanjutnya akan dilakukan koordinasi dan

No.	Jenis Pemeriksaan	Temuan	SKPD	Status Tindak Lanjut	Rekomendasi	Penyebab / Alasan Belum Sesuai	Keterangan
							penagihan kembali ke daftar nama yang belum ditemui
5.	LKPD Tahun 2014	Penatausahaan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Kurang Memadai	Dispenda/ Bapenda	BS	BPK RI merekomendasikan Gubernur Kaltim agar memerintahkan Kepala Dispenda untuk meningkatkan pengendalian atas sistem penerimaan PBBKB dan menegur Kepala Bidang Pajak Daerah dan Kepala Seksi Pajak Daerah Lainnya untuk lebih cermat dalam melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi penerimaan PBBKB serta: Memerintahkan Kepala Dispenda mengenakan denda keterlambatan kepada PT SPE dan PT PE yang tidak menyetor PBBKB sesuai waktu yang ditentukan, masing-masing sebesar Rp.266.883.202,58 dan Rp.64.024.737,72	Sudah ada bukti slip setoran sebesar Rp.266.883.202,58 Yang belum ada setoran sebesar Rp.64.024.737,73 Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi karena baru ada pernyataan secara sepihak dari PT. Solaris Prima Energy yang menyatakan bahwa PT tersebut bangkrut. Perlu konfirmasi dengan Tim TLHP BPK-RI	Belum ada pembayaran sampai dengan saat berakhirnya monev tindak lanjut, selanjutnya akan dilakukan koordinasi kembali kepada PT SPE untuk dilakukan penagihan
6.	LKPD Tahun 2021	Kurang Penerimaan atas Pembayaran PKB pada UPTD PPRD Kutai Timur dan UPTD PPRD Bontang sebesar Rp1.254.398.885,00	Bapenda, UPTD PPRD Kutai Timur dan UPTD PPRD Bontang	BS	Kepala Badan Pendapatan Daerah supaya memproses kekurangan penerimaan sebesar Rp1.166.428.565,00 (Rp1.254.398.885,00 – Rp87.970.320,00) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah; dan	Belum ada setoran dari UPTD PPRD Kutai Timur dan UPTD PPRD Bontang sebesar Rp1.166.428.565,00	Sudah dilakukan setoran untuk UPTD PPRD Bontang sebesar Rp.87.920.320,00 sehingga sisa setoran yang harus disetor : UPTD PPRD Kutim Rp.1.149.455.530,00 UPTD PPRD Bontang Rp.16.973.035,00
7.		Potensi Kurang Pungut Atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Bapenda	BS	Kepala Badan Pendapatan Daerah supaya memproses kekurangan penerimaan sebesar Rp21.940.559,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah;	Belum ada STS Penyetoran ke kas daerah sebesar Rp21.940.559,00	Sudah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah